

BAB IX

PENUTUP

9.1.Kesimpulan

Kesimpulan adalah proses akhir untuk menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian. Oleh karena itu sebelum sampai pada kesimpulan diperlukan deskripsi terlebih dahulu. Penelitian ini telah memberikan deskripsi tentang implementasi kebijakan pendidikan inklusif, maka tahap selanjutnya adalah memberikan jawaban dari pertanyaan atau masalah penelitian. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Mekanisme penyelenggaraan pendidikan bagi ABK di sekolah reguler penyelenggara pendidikan inklusif Sumatera Utara tidak berjalan dengan baik. Hal ini lebih disebabkan komunikasi yang tidak berjalan antara sekolah dengan Dinas Pendidikan Sumatera Utara tentang langkah konkret yang harus dilakukan sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif di Sumatera Utara. Peran penyelenggara SLB yang menjadi pendamping sekolah reguler dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif di Provinsi Sumatera Utara tidak pernah dilakukan. Hal ini disebabkan karena komunikasi antar Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Sekolah reguler penyelenggara pendidikan inklusif dan SLB sebagai tenaga pendukung tidak pernah dilakukan. Pelayanan pendidikan inklusif di sekolah reguler Provinsi Sumatera Utara yang melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif berkaca pada Permendiknas No.70 Tahun 2009 tidak berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari regulasi di tingkat provinsi dan

kabupaten di Sumatera Utara yang tidak pernah ada sebagai terjemahan dari Permendiknas No.70 Tahun 2009 tentang pendidikan Inklusif.

- Dalam proses berjalannya pendidikan inklusi khususnya di sekolah regular Provinsi Sumatera Utara terdapat empat faktor penghambat sehingga pendidikan inklusi itu tidak berjalan. Keempat faktor penghambat tersebut adalah faktor regulasi, faktor kepemimpinan, faktor pendampingan dan faktor kewenangan.
- Model Implementasi Pendidikan Inklusif di Provinsi Sumatera Utara dibagi dalam dua pendekatan yakni internal dan eksternal. Internal berkaitan dengan langkah yang dilakukan dalam mengimplementasi pendidikan inklusif yakni dengan Program pembelajaran yang diindividualisasikan dan pendekatan eksternal berkaitan dengan langkah apa yang harus dilakukan agar pendidikan inklusif itu berjalan yakni dengan menerapkan sosialisasi regulasi, menggalakkan workshop dan lokakarya inklusif, penerapan integritas dan pengkhususan bidang pendidikan inklusif di Dinas Provinsi Sumatera Utara.

9.2.Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diurai, maka berikut rekomendasi dari hasil penelitian ini yang dapat diambil oleh para pemangku kebijakan dan seluruh stakeholder Pendidikan Inklusif di Sumatera Utara. Rekomendasi yang dapat diberikan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Untuk meningkatkan efektifitas implementasi pendidikan inklusif di Sumatera Utara, terutama dalam hal operasional maka perlu sosialisasi regulasi di tingkat provinsi sebagai bentuk terjemahan dari Permendiknas

No. 70 Tahun 2009.

- Untuk menjaga kualitas pendidikan inklusif di Sumatera pengkajian tentang implementasi perlu diintegrasikan dimana sekolah yang menyelenggarakan pendidikan Inklusif, Dinas Pendidikan Sumatera Utara dan beberapa SLB di Sumatera Utara duduk bersama untuk merumuskan langkah strategis yang harus dilakukan.
- Perlu divisi tambahan yang mengatur secara khusus pendidikan inklusif di dinas Pendidikan Sumatera Utara. Meletakkan pendidikan Inklusif di salah satu bidang seperti bidang pembinaan sekolah menengah atas, pembinaan sekolah menengah kejuruan dan pembinaan pendidikan khusus bukan solusi yang tepat yang justru akan meberikan ruang tumpang tindih pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2006. Kebijakan Publik. Jakarta: Suara Bebas.
- Agustino, Leo. 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta.
- Akib . 2016. Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (Mtr) Di Kota Makassar. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 6(2), 21-34.
- Anderson, James, A. 1984. Public Policy Making Third Edition. Penerbit Houghton Mifflin Company; USA.
- Bachri. 2010h. Menyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. Jurnal Teknologi Pendidikan, X(1), 46-62.
- Behdioglu, Sema and Sener, Habibe Yelda. 2014. Improving Service Quality in Special Education Institutions: Servqual Scale. Global Business Managemkusuent Research: An International Journal Volume 6 Nomor 2 Tahun 2014: GBMR Publishing.
- Barata, Atep. 2004. Dasar- dasar Pelayanan Prima. Jakarta: Elex Media. Komputindo
- Burrell, dan Morgan. 1979. Sociology paradigms and organizational analysis: elements of sociology of corporate life, London: Heineman Educational Books, Ltd.
- Crawson, Michael and Brandes, Joyce. 2010. Predicting Community Opposition to Inclusion in Schools: The Role of Social Dominance, Contact, Intergroup Anxiety, and Economic Conservation. The Journal of Psychology, 2010, 144 (2), 121 – 144: Taylor and Francis Group, LLC
- Creswell. 1998. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Delphie, Bandi. 2006. Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus (dalam setting Pendidikan Inklusi). Bandung: PT Refika Aditama.
- Donnelly, Verity and Watkins, Amanda. 2010. Teacher Education For Inclusion In Europe. The Journal Prospect (2011) 41: 341-553: UNESCO IBE
- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Terjemahan). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus. 2010. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edwards III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Efendi. Mohammad. 2009. Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan, Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Elliott, Timothy, et.al. 2014. Medical Personal Care Services For Children With Intellectual Disabillities: What Assistance Is Provided? When Is Assistance Provided?. Journal Intellectual and Developmental Disabilities Volume 52 No. 1 24-31 (2014): AAIDD Publishing
- Emzir dan Chan, Sam. 2010. Isu-isu Kritis Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hildebrand, Verna. 2000. Introduction to Early Childhood Education, 4 th, ed. New York : Mac Millan Publishing Co.

- Hikmawati, E dan Rusmiyati, C. 2011. Kebutuhan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat. Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial; 16 (1) 17-32
- Heward. 2003. *Exceptional Children An Introduction to Special Education*. New Jersey: Merrill, Prentice Hall.
- Hogwood, Brian W, and Lewis A. Gunn., 1998. *Policy Analysis For The Real Word*. Oxford University Press, USA.
- Ilahi, Takdir, Mohammad. 2013. Pendidikan Inklusif (Konsep dan Aplikasi). Yogyakarta: Arruz Media.
- Iswari. Mega 2007. *Kecakapan Hidup Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Depdiknas.
- Jones, Charles O. 1970. *An Introduction to the Study of Public Policy*, (Belmont, CA: Wadsworth).
- Kadji, Yulianto.2015. *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik*. Universitas Negeri Gorontalo Press.
- 2008. Implementasi Kebijakan Publik melalui MSN Approach, Jurnal Teknologi dan Manajemen Indonesia. Volume 6 Edisi Khusus Juli 2008, Universitas Merdeka Malang
- Kartono, Kartini, 1998. *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Pemimpin Abnormal Itu?* Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Keban, T, Yeremias, 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta.
- Kulish, Anatoliy N, et.al. 2016. Implementation and Administrative Framework of the Inclusive Education in The Context of The Eurofean Integration Process. *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, Volume VII Issue 6 (20) Fall 2016: Asers Publishing.
- Kusuma. 2017. Manfaat Program Pendidikan Inklusi untuk Aud. *Jurnal Pendidikan Anak*. Vol. 6 (1), 12-19.
- Kusumanegara, Solahuddin, 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gava Media.
- Liliweri. Alo. 2004. *Dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lubis. Fakhrurozi. 2018. *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kota Medan*. Universitas Sumatera Utara. Tidak Dipublikasikan
- Lynch, James, 1994, *Proyction for Children with Special Need Education in Asian Region, USA: The World Bank*
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti dan Untuk Pelayanan Publik)* Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta.
- Marthan, Lay Kekeh. 2007. *Manajemen Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Depdiknas
- Mariana. Dede.2010."Otonomi Daerah dan Inovasi Kebijakan". *Governance Jurnal*.Volume 1, Nomor 1.
- Munhurrn, Et, al (2010) *Service Quality In the Public Service: International Journal of Management and Marketing Research (IJMMR)* Volume 3 Number 1 2010 <http://ssrn.com/abstract=1668833>

- Mahsun, Mohamad, 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit BPFE
- Maleong, Lexy. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mercer, Cecil D & Mercer, Ann R., 1989, Teaching Student with Learning Problems, Aus: Merill Publishing Company A Bell & Howel Information Company
- Saldana, J. 2014. Qualitative Data Analysis. Third Edition Sage Publications, Inc. California
- Nugroho, Riant. 2017. Public Policy (Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik, Kimia Kebijakan Publik). Jakarta: Gramedia.
- _____. 2016. Kebijakan Publik Di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- _____. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. PT. Elex Media Komputindo; Jakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta; PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nurani, Apdita Suci, dkk. 2015. Responsivitas Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dalam Perspektif New Public Service. Jurnal Wacana Volume 18 Nomor 4 Tahun 2015, ISSN 1411 – 0199 E-ISSN 2338 – 1884 Universitas Brawijaya.
- Payne, S James & Patton, R James. 1981. Mental Retardation. Ohio: Bell & Howell Comphilany.
- Pramudiana, Ika, Devy. 2017. Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Untuk ABK di Surabaya. Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran Volume 5 No. 1 Januari 2017: Universitas Soetomo.
- Prastiyono. 2013. Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif (Studi di Sekolah Galuh Handayani Surabaya). Jurnal DIA Jurnal Administrasi Publik Edisi Juni 2013 Volume 11 Nomor 1.
- Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif
- Putra, Fadillah. 2001. Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik ... Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Rohman, Arif. 2012. Kebijakan Pendidikan (Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi): Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Rusli, Budiman. 2000. *Pola Kebijakan Publik tentang Kerjasama antar Pemerintah Kotamadya dan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dalam Pembangunan Prasarana Kota Terpadu Cirebon Raya*. Pascasarjana UNPAD; Bandung.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, Jogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Suharmini. Tin. 2009. Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus. Yogyakarta: Kanwa Publisher.
- Smith. David. 2006. Inklusi Sekolah Ramah Untuk Semua, terj. Ny Erica Denis, Muhammad Sugiarmun, Mif Baihaqi (ed). Bandung: Nuansa
- Sulistiyadi, Hery, Kurnia. 2014. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Kebijakan

- dan Manajemen Publik Volume 2 Nomor 1 Januari 2014, ISSN 2303 - 341 X Universitas Airlangga.
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1986 tentang penyelenggaraan pendidikan terpadu di Indonesia.
- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/514/KPTS/2015 tentang Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Provinsi Sumatera Utara.
- Suyanto & Mudjito. 2012. Masa Depan Pendidikan Inklusi. Jakarta. Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2012
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2003. Kebijakan Publik (Untuk Pemimpin Berwawasan Internasional). Yogyakarta: Balairung.
- Tarmansyah. 2007. Inklusi Pendidikan Untuk Semua. Jakarta: Depdiknas
- Taylor. 1975. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remadja Karya
- Thahier, Rohana. 2016. Konseptual dan Konstektual Administrasi dan Organisasi Terhadap Kebijakan Publik. Bandung: Refika Aditama
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
- Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Widodo. 1974. Pengukuran Kerja. Yogyakarta: Balai Pembinaan
- Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2005. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Woll, P. 1966. *Public Administration and Policy*. New York: Harper Torchbooks.
- Yu, Lizhong, et.al. 2011. Issues of Teacher Education and Inclusion in China. *Journal Prospects* Volume 41:355 -369: Unesco Ibe.
- Yang, Chien Hui and Rusli, Enniati. 2012. Teacher Training In Using Effective Strategies For Preschool Children With Disabilities In Inclusive Classrooms. *Journal of College Teaching and Learning – First Quarter* 2012, Volume 9 Number 1 (2012): The Clute Institute